



# Analisis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Satuan Pendidikan Nonformal di Indonesia

**Dimas Pahlawanita Damayanti**  
Universitas Negeri Malang, Indonesia  
E-mail: [dimasehasan@gmail.com](mailto:dimasehasan@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-05-13 Revised: 2025-06-23 Published: 2025-07-02  <b>Keywords:</b> <i>Policy Implementation; Independent Learning; Non-formal Education Units.</i>	The Merdeka Belajar (Freedom to Learn) policy was implemented to address the challenge of relevance in Indonesia's non-formal education (NFE) sector, particularly the competency gap between graduates and labor market demands. This study aims to critically analyze the implementation of the Merdeka Belajar policy in NFE units, identify fundamental challenges, and formulate strategic recommendations. Employing a qualitative method based on a literature review, data from policy documents, scientific journals, and research reports were analyzed using thematic content analysis. The findings indicate that the policy's effectiveness is constrained by several fundamental challenges, including: (1) inadequate professional competence among tutors, (2) suboptimal synchronization of project-based curricula with industry needs, and (3) disparities in the quality of independent assessments across educational units. Consequently, this study recommends strengthening policies focused on improving tutor quality and developing authentic community-based education. This study contributes to the literature on non-formal education policy evaluation in Indonesia by offering a systematic analytical framework and evidence-based recommendations for quality improvement in the Merdeka Belajar era.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-05-13 Direvisi: 2025-06-23 Dipublikasi: 2025-07-02  <b>Kata kunci:</b> <i>Implementasi Kebijakan; Merdeka Belajar; Satuan Pendidikan Nonformal.</i>	Kebijakan Merdeka Belajar diimplementasikan untuk menjawab tantangan relevansi pendidikan nonformal (PNF) di Indonesia, terutama terkait kesenjangan kompetensi lulusan dengan tuntutan pasar kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implementasi kebijakan Merdeka Belajar di satuan PNF, mengidentifikasi tantangan fundamental yang dihadapi, dan merumuskan rekomendasi strategis. Menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, data dari dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian dianalisis dengan analisis konten tematik. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ini masih terbatas akibat sejumlah tantangan, mencakup: (1) minimnya kompetensi profesional tutor, (2) belum optimalnya sinkronisasi kurikulum berbasis proyek dengan kebutuhan industri, dan (3) disparitas kualitas asesmen mandiri antar satuan pendidikan. Sebagai hasilnya, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas tutor dan pengembangan pendidikan berbasis komunitas yang otentik. Studi ini berkontribusi dalam memperkaya kajian evaluasi kebijakan pendidikan nonformal di Indonesia dengan menawarkan kerangka analisis yang sistematis serta rekomendasi berbasis bukti untuk peningkatan mutu PNF di era Merdeka Belajar.

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan nonformal (PNF) merupakan jalur pendidikan terstruktur di luar sistem persekolahan formal yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi individu (Syaadah et al., 2023). Karakteristik utamanya terletak pada fleksibilitas waktu, tempat, dan materi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik peserta didik. Berbeda dari pendidikan formal yang terikat kurikulum baku, PNF berfokus pada pembelajaran praktis dan pengembangan keterampilan yang berorientasi pada penerapan langsung. Cakupannya meliputi beragam kegiatan, mulai dari kursus, pelatihan

keterampilan, bimbingan belajar, hingga program pendidikan berbasis komunitas. Dengan demikian, jalur ini memegang peranan krusial dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem formal, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh.

Sebagai alternatif pendidikan yang sistematis, PNF memberikan kesempatan belajar dengan prinsip relevansi yang kuat terhadap kebutuhan aktual di masyarakat (AF et al., 2022; Syaadah et al., 2023). Tujuannya pun beragam, mulai dari pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar

seperti keaksaraan dan kesetaraan, hingga fasilitasi pengembangan minat dan bakat pada tingkat lanjut melalui pendidikan kesenian atau keagamaan (Susanti, 2016). Melalui berbagai program unggulannya, PNF berupaya membantu individu mengembangkan potensi diri untuk menciptakan SDM yang kompeten dan berdaya saing (Kuntoro, 2006).

Meskipun demikian, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kualitas lulusan. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kompetensi yang dihasilkan oleh satuan PNF dengan tuntutan pasar kerja (Siahaan et al., 2025). Akibatnya, banyak lulusan mengalami kesulitan bersaing di dunia kerja karena minimnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri (Ahmad et al., 2022). Menghadapi persoalan ini, pemerintah Indonesia menggagas kebijakan Merdeka Belajar sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, termasuk di sektor nonformal.

Merdeka Belajar adalah kebijakan yang memberikan otonomi kepada peserta didik untuk belajar secara fleksibel sesuai minat dan bakat mereka (Syufa'ati & Nadhifah, 2020). Konsep ini mengedepankan proses pembelajaran yang dipersonalisasi, menyenangkan, dan relevan, yang memungkinkan peserta didik membangun portofolio kompetensi tanpa paksaan untuk menguasai bidang di luar potensinya. Secara filosofis, prinsip-prinsip Merdeka Belajar sejatinya telah lama melekat dalam PNF, yang tecermin dari fleksibilitas waktu dan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (Lailatul et al., 2023). Kehadiran modul-modul pembelajaran yang dapat diakses secara terbuka semakin mengukuhkan bahwa semangat kemandirian belajar merupakan DNA dari pendidikan nonformal.

Namun, implementasi kebijakan Merdeka Belajar secara formal di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan krusial adalah metode pembelajaran yang masih cenderung tradisional dan berpusat pada tutor, padahal pendekatan yang diharapkan adalah pembelajaran mandiri dengan tutor sebagai fasilitator. Masalah ini diperburuk oleh kualifikasi dan kompetensi tutor yang seringkali belum memadai, bahkan banyak yang tidak terdata secara resmi sebagai tenaga pendidik. Kombinasi tantangan ini berisiko menghambat efektivitas program dan pencapaian tujuan kebijakan.

Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam konteks pendidikan nonformal di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji berbagai tantangan yang muncul dari perspektif evaluasi kebijakan, guna menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan nonformal di Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka. Data dikumpulkan secara sistematis dari sumber primer (dokumen kebijakan resmi) dan sumber sekunder (jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, dan laporan penelitian relevan) yang terbit sejak tahun 2019. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan pola-pola kunci terkait implementasi dan tantangan kebijakan Merdeka Belajar dalam konteks pendidikan nonformal (cf. Braun & Clarke, 2006). Kredibilitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni dengan memverifikasi silang informasi antara dokumen pemerintah, kritik akademis, dan temuan penelitian independen untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan seimbang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Satuan Pendidikan Nonformal di Era Merdeka Belajar**

Kebijakan Merdeka Belajar yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia merepresentasikan sebuah pergeseran paradigma fundamental dalam lanskap pendidikan nasional. Secara prinsip, kebijakan ini bertujuan memberikan otonomi yang luas kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi unik mereka, dengan muara akhir untuk menciptakan individu yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Dalam konteks Pendidikan Nonformal (PNF), yang secara inheren memiliki sifat fleksibel, kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan sebuah momentum untuk revitalisasi dan redefinisi peran. PNF ditantang untuk bertransformasi dari sekadar penyedia alternatif pendidikan menjadi inkubator talenta yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

Tuntutan perubahan ini menyentuh aspek-aspek paling mendasar dari tata kelola satuan pendidikan nonformal. Lembaga seperti Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, dan pelatihan harus mampu bergerak melampaui model pengajaran konvensional. Mereka dituntut untuk secara proaktif merancang dan menyiapkan ekosistem pembelajaran yang kaya, mencakup sumber belajar yang relevan, kurikulum yang dinamis, serta program-program kerja yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata (*real-world problem solving*) dan pengembangan keterampilan berbasis proyek. Esensi dari Merdeka Belajar sesungguhnya terletak pada terciptanya proses pembelajaran yang memerdekakan, di mana peserta didik dan tutor dapat berkembang secara sinergis dalam lingkungan yang kolaboratif. Proses ini menjadi krusial untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan agar siap menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, dan kompleksitas masyarakat digital yang menuntut kompetensi baru di luar pengetahuan tekstual (Lamuri & Laki, 2022). Artikel ini akan menganalisis secara mendalam berbagai implikasi, peluang, dan tantangan yang dihadapi PNF dalam mengimplementasikan pilar-pilar kebijakan Merdeka Belajar.

a) Implikasi Merdeka Belajar pada Desain Kurikulum Nonformal

Salah satu dampak paling langsung dari Merdeka Belajar adalah tuntutan dekonstruksi dan rekonstruksi kurikulum PNF agar menjadi lebih fleksibel, personal, dan adaptif. Untuk mendukung kebebasan belajar, penerapan kurikulum yang berpusat pada peserta didik menjadi sebuah keniscayaan. Dua pendekatan yang menonjol dalam kerangka ini adalah pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) dan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*). Pendekatan berbasis proyek, secara khusus, mendorong keterlibatan aktif dan otentik dari peserta didik. Mereka tidak lagi menjadi penerima pasif informasi, melainkan investigator, desainer, dan pemecah masalah yang belajar secara kontekstual dengan mengerjakan proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan mereka (Kamaruddin et al., 2023).

Sebagai contoh, dalam program kesetaraan Paket C, kurikulum dapat dirancang dalam bentuk proyek multidisipliner. Sebuah proyek tentang "Pengembangan Ekowisata Lokal Berbasis

Komunitas" dapat mengintegrasikan mata pelajaran geografi (analisis potensi wilayah), ekonomi (penyusunan rencana bisnis), bahasa Indonesia (pembuatan proposal dan materi promosi), serta teknologi informasi (pemasaran digital). Melalui proyek semacam ini, kurikulum memfasilitasi pengembangan kompetensi holistik. Peserta didik tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mengasah keterampilan abad ke-21 yang krusial, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi (Muhammad Rafik et al., 2022).

Fleksibilitas kurikulum ini juga harus tecermin dalam upaya menyediakan akses yang setara dan pembelajaran yang terdiferensiasi. Pendidikan yang berhasil adalah yang mampu menyesuaikan sistemnya dengan kebutuhan individu, bukan sebaliknya, yang memaksa individu untuk masuk ke dalam cetakan sistem yang kaku (Ulum & Syafi'i, 2022). Oleh karena itu, satuan PNF perlu merancang struktur kurikulum modular yang memungkinkan peserta didik untuk maju sesuai kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing (*self-paced learning*). Hal ini sejalan dengan elemen-elemen kunci Merdeka Belajar yang mencakup keterlibatan aktif, inisiatif diri, dan pembelajaran yang bermakna (Yasmansyah & Sesmiarni, 2022), serta prinsip-prinsip regulasi diri dan diferensiasi dalam proses pembelajaran (Ramadan & Tabroni, 2020). Kurikulum yang memerdekakan adalah kurikulum yang memberi ruang bagi eksplorasi minat individu secara mendalam tanpa mengorbankan pencapaian kompetensi inti.

b) Peran Sentral Sumber Belajar Kontekstual

Dalam rangka mendukung implementasi kurikulum yang dinamis dan berbasis proyek, peran sumber belajar menjadi sangat sentral dan harus dimaknai secara lebih luas. Sumber belajar tidak lagi terbatas pada buku teks atau modul yang disediakan oleh pemerintah. Dalam paradigma Merdeka Belajar, seluruh lingkungan—baik fisik maupun digital—adalah sumber belajar yang potensial. Pendidikan nonformal, sebagaimana dikemukakan oleh Rifai et al. (2022), memiliki keunggulan komparatif dalam kemampuannya untuk menyelaraskan

pembelajaran dengan kebutuhan lokal dan minat peserta didik yang sangat beragam.

Oleh karena itu, pemanfaatan sumber belajar harus bersifat sangat kontekstual. Di daerah agraris, sawah, pasar tani, atau kelompok tani dapat menjadi laboratorium hidup. Di kawasan pesisir, kehidupan nelayan, industri pengolahan ikan, atau ekosistem mangrove menjadi sumber pengetahuan yang tak ternilai. Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) setempat, mengundang praktisi, pengrajin lokal, atau tokoh masyarakat sebagai "tutor tamu" adalah strategi untuk mendekatkan pembelajaran dengan realitas. Prinsip ini sejalan dengan pandangan UNESCO yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis keterampilan dan kompetensi sebagai respons otentik terhadap tuntutan pasar kerja yang terus berubah (Kushnir & Nunes, 2022).

Selain sumber belajar fisik, pemanfaatan sumber belajar digital menjadi kunci. Platform pembelajaran daring, *Open Educational Resources* (OER), video tutorial, simulasi virtual, dan forum diskusi global membuka akses terhadap pengetahuan tanpa batas. Tugas satuan PNF adalah memfasilitasi akses ini dan membekali peserta didik dengan kemampuan literasi digital, yakni kemampuan untuk mencari, mengevaluasi secara kritis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber digital. Namun, tantangan kesenjangan digital (*digital divide*) tetap menjadi isu serius yang harus diatasi melalui kebijakan afirmatif agar tidak menciptakan marginalisasi baru.

#### c) Transformasi Penilaian

Transformasi paling signifikan dan seringkali paling kontroversial dalam kebijakan Merdeka Belajar terletak pada perombakan sistem evaluasi dan penilaian. Kebijakan ini secara radikal mengubah lanskap asesmen nasional dengan menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN). USBN yang sebelumnya dikoordinasikan oleh dinas pendidikan (S. A. Putri et al., 2024), kini digantikan sepenuhnya oleh Penilaian Satuan Pendidikan (PSP). Kebijakan ini secara fundamental memberikan otonomi dan kepercayaan kepada satuan pendidikan—termasuk PNF—untuk merancang, melaksanakan,

dan menentukan standar kelulusan bagi peserta didiknya. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya asesmen yang lebih otentik, kontekstual, dan terintegrasi dengan proses pembelajaran sehari-hari, seperti penilaian portofolio, unjuk kerja, presentasi proyek, dan observasi.

Penghapusan UN didasarkan pada kritik yang telah lama bergulir, di mana UN dianggap mendorong praktik pembelajaran yang dangkal (*teaching to the test*), membebani siswa dengan kecemasan, dan hanya mengukur sebagian kecil dari kompetensi kognitif tingkat rendah (Taufiq et al., 2024). Sebagai penggantinya, pemerintah memperkenalkan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), yang berfokus pada dua kompetensi dasar: literasi membaca dan numerasi. AKM tidak dirancang untuk menilai individu, melainkan untuk memetakan kualitas sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan daerah.

Langkah ini memicu perdebatan sengit mengenai peran konten pengetahuan. Sebagian pihak khawatir bahwa penghapusan ujian berbasis materi akan membuat peserta didik meremehkan penguasaan konten. Namun, dalam kerangka Merdeka Belajar, keduanya dipandang sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Penilaian berbasis materi (misalnya melalui ujian formatif dan sumatif yang dirancang tutor) tetap penting untuk memastikan penguasaan konsep dasar, sementara AKM dan penilaian otentik lainnya berfungsi untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah kompleks di dunia nyata. Dengan demikian, sistem penilaian yang ideal adalah yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian peserta didik, baik dalam ranah pengetahuan, keterampilan, maupun karakter.

#### d) Evolusi Peran Tutor

Di tingkat implementasi, semua inovasi kurikulum dan penilaian akan menjadi sia-sia tanpa adanya transformasi pada peran tutor. Kebijakan Merdeka Belajar turut menyentuh aspek ini melalui penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang bertujuan mengurangi beban administratif agar tutor dapat lebih fokus pada substansi

pengajaran. Namun, isu ini jauh lebih dalam dari sekadar jumlah halaman RPP. Perubahan yang dituntut adalah evolusi peran tutor dari seorang pengajar (*teacher*) yang menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, menjadi seorang fasilitator, mentor, dan kurator pengalaman belajar.

Dalam model pembelajaran berbasis proyek, tutor berperan sebagai pemantik diskusi, pembimbing yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, dan penghubung peserta didik dengan sumber belajar yang relevan. Mereka harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman secara psikologis, di mana peserta didik berani mencoba, gagal, dan belajar dari kegagalan. Seperti yang dinyatakan Aisyah (2018), perencanaan yang baik akan mendekatkan pada pencapaian tujuan, dan dalam konteks ini, perencanaan yang baik berarti merancang skenario pembelajaran yang menantang dan bermakna.

Tantangan terbesarnya adalah kesiapan dan kapasitas tutor PNF itu sendiri. Banyak di antara mereka yang merupakan tenaga honorer dengan kualifikasi dan kesejahteraan yang belum memadai. Oleh karena itu, investasi masif dalam program pengembangan profesional berkelanjutan (CPD) bagi tutor PNF menjadi syarat mutlak keberhasilan Merdeka Belajar. Program ini harus berfokus pada peningkatan kompetensi pedagogis modern, keterampilan digital, serta kemampuan merancang asesmen otentik.

#### e) Kebijakan Zonasi

Meskipun lebih dominan diterapkan di sektor pendidikan formal, filosofi yang mendasari kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki relevansi penting untuk dibahas dalam konteks PNF. Kebijakan zonasi bertujuan untuk membongkar hierarki "sekolah favorit" dan mendorong pemerataan mutu pendidikan, baik dari segi kualitas guru, sarana prasarana, maupun input siswa. Tujuannya adalah agar setiap sekolah menjadi sekolah yang berkualitas, sehingga akses terhadap pendidikan yang baik tidak lagi ditentukan oleh status sosial-ekonomi atau lokasi tempat tinggal.

Implementasinya menghadapi tantangan kultural yang kuat, yakni persepsi

masyarakat yang masih menganggap sekolah tertentu sebagai jaminan kesuksesan. Mengubah pola pikir ini memerlukan pendekatan jangka panjang dan bukti nyata bahwa kualitas pendidikan benar-benar merata. Di sinilah PNF dapat memainkan peran strategis. Ketika sistem formal berupaya meratakan kualitas, PNF dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sekaligus sebagai jalur alternatif yang inovatif. PNF dapat menawarkan program-program keahlian spesifik yang tidak tersedia di sekolah formal terdekat, sehingga menjadi pilihan rasional bagi peserta didik yang ingin mengembangkan talenta khusus, terlepas dari sistem zonasi. Dengan demikian, penguatan PNF adalah bagian tak terpisahkan dari agenda besar pemerataan akses dan kualitas pendidikan nasional.

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam ekosistem pendidikan nonformal membawa implikasi yang mendalam dan juga multidimensional, menyentuh aspek kurikulum, sumber belajar, sistem penilaian, hingga peran krusial seorang tutor. Transisi menuju kurikulum yang fleksibel dan personal, penilaian berbasis kompetensi yang otentik, serta pemanfaatan sumber belajar yang kontekstual merupakan langkah-langkah strategis yang berpotensi merevolusi PNF menjadi lembaga pendidikan yang relevan dan berdaya saing.

Namun, perjalanan transformasi ini dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Tantangan utama terletak pada kesenjangan antara idealisme kebijakan dengan realitas kapasitas di lapangan, terutama terkait kompetensi dan kesejahteraan tutor. Selain itu, perubahan pola pikir di kalangan pengelola, tutor, peserta didik, dan masyarakat untuk beralih dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran juga memerlukan waktu dan upaya yang konsisten.

Maka dari itu, untuk memastikan keberhasilan implementasi, beberapa langkah strategis perlu ditempuh. Pertama, pemerintah perlu memprioritaskan investasi pada program peningkatan kapasitas dan sertifikasi bagi tutor PNF secara masif dan berkelanjutan. Kedua, satuan-satuan PNF harus didorong untuk membangun kemitraan yang kuat dengan industri lokal dan komunitas sebagai

sumber belajar otentik. Ketiga, diperlukan pengembangan infrastruktur digital yang merata untuk mendukung akses terhadap sumber belajar yang lebih luas. Pada akhirnya, keberhasilan Merdeka Belajar akan sangat bergantung pada komitmen kolektif semua pemangku kepentingan untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan melakukan evaluasi berkelanjutan demi mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan mampu melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

## 2. Faktor Pendukung, Kelebihan, dan Kelemahan dalam Implementasinya Merdeka Belajar

Kebijakan Merdeka Belajar, yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), secara fundamental bertujuan memberikan otonomi yang lebih luas kepada satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik dalam mengelola proses pembelajaran (Kemendikbudristek, 2022). Dengan memperkenalkan konsep pembelajaran yang fleksibel, kebijakan ini dirancang untuk menyesuaikan ekosistem pendidikan agar relevan dengan dinamika sosial. Langkah ini merupakan respons strategis terhadap kebutuhan dan tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Meskipun demikian, sebagai sebuah transformasi besar, implementasi Merdeka Belajar membawa serangkaian peluang signifikan sekaligus tantangan kompleks yang perlu dikaji secara mendalam.

Salah satu komponen utama dalam kebijakan Merdeka Belajar adalah pengembangan model evaluasi yang lebih otonom melalui Ujian Sekolah (yang sebelumnya dikenal sebagai Ujian Sekolah Berstandar Nasional/USBN). Kebijakan ini memberikan kebebasan bagi sekolah untuk merancang model ujian yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan lokal. Model penilaiannya pun dapat beragam, mulai dari ujian tulis, penugasan, hingga portofolio. Fleksibilitas ini memungkinkan evaluasi kompetensi siswa dilakukan secara lebih holistik dan adaptif terhadap konteks spesifik mereka.

Hal ini memberikan peluang bagi sekolah untuk menilai kemampuan siswa secara menyeluruh, melampaui sekadar angka atau skor yang dihasilkan dari ujian standar. Pendekatan ini selaras dengan teori pendidikan konstruktivisme, seperti yang

dikemukakan oleh Jean Piaget (1952) dan Lev Vygotsky (1978), yang menyatakan bahwa proses belajar menjadi lebih efektif ketika mengakomodasi keunikan dan perkembangan masing-masing individu. Dengan demikian, ujian sekolah yang memberi ruang bagi fleksibilitas dalam penilaian dapat dipandang sebagai cerminan prinsip-prinsip konstruktivisme, yakni menempatkan siswa sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran dan evaluasinya.

Meskipun memberikan otonomi yang lebih besar, model evaluasi melalui Ujian Sekolah (sebelumnya USBN) ini juga memiliki kelemahan utama, yakni ketidakhadiran standar nasional yang tegas dalam pelaksanaannya. Tanpa standar yang baku, muncul risiko variasi kualitas ujian yang signifikan antar sekolah. Hal ini berimplikasi pada kurangnya jaminan mutu bahwa model penilaian yang dikembangkan secara mandiri dapat secara konsisten mengukur pencapaian standar kompetensi yang diharapkan. Lebih jauh lagi, kondisi ini dapat memperlebar disparitas kualitas pendidikan antar daerah, mengingat tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang memadai untuk merancang instrumen penilaian yang berkualitas.

Situasi ini dapat bertentangan dengan prinsip standarisasi dalam evaluasi pendidikan. Sebagai contoh, Guskey (2002) menyatakan bahwa sistem evaluasi pendidikan yang ideal harus bersifat konsisten dan adil secara nasional, sebuah prinsip yang sulit diwujudkan sepenuhnya dalam model Ujian Sekolah yang terdesentralisasi.

Adapun perubahan Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter merupakan aspek lain dari kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan untuk menilai kompetensi minimum siswa dengan cara yang lebih terukur dan lebih menekankan pada aspek karakter. Penurunan beban psikologis bagi siswa dan guru menjadi salah satu keunggulan yang jelas dari kebijakan ini. Siswa tidak lagi dihadapkan pada ujian yang terlalu kompleks dan menuntut, melainkan lebih berfokus pada penguasaan kompetensi dasar yang relevan dengan kebutuhan masa depan mereka. Selain itu, survei karakter memberikan gambaran yang lebih luas tentang nilai-nilai moral dan sikap sosial siswa, yang mana aspek ini sangat penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Hal ini relevan dengan teori pendidikan humanistik yang mengutamakan perkembangan siswa secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif tetapi juga afektif dan sosial.

Namun, di balik keunggulannya, kebijakan asesmen ini juga memiliki kelemahan yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah keterbatasan cakupan pengukuran. Penilaian yang hanya berfokus pada kompetensi minimum dinilai kurang mampu menggambarkan spektrum kemampuan siswa secara utuh. Pengukuran ini berisiko tidak menangkap potensi akademik siswa di bidang lain maupun keunggulan non-akademik mereka, yang dapat berakibat pada kurangnya pengakuan terhadap prestasi siswa yang berpotensi luar biasa.

Di sisi lain, penilaian karakter melalui survei menghadapi tantangan reliabilitas dan validitas yang signifikan, karena hasilnya rentan terhadap bias respons sosial—kecenderungan siswa untuk menjawab sesuai dengan apa yang dianggap baik secara sosial—dan subjektivitas interpretasi dari penilai. Tantangan ini sejalan dengan kerangka Taksonomi Ranah Afektif yang dikembangkan oleh Krathwohl, Bloom, dan Masia (1964), yang menegaskan bahwa pengukuran aspek internal seperti nilai, sikap, dan karakter secara objektif dan akurat merupakan hal yang sangat kompleks.

Kebijakan Merdeka Belajar juga membawa perubahan penting dalam hal perencanaan pembelajaran, yang secara resmi diatur melalui Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasarkan regulasi tersebut, RPP yang sebelumnya memuat banyak komponen administratif kini disederhanakan menjadi tiga komponen inti: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

Dengan penyederhanaan ini, pendidik diharapkan dapat lebih fokus pada substansi dan proses pembelajaran itu sendiri, tanpa terbebani oleh kompleksitas administrasi yang sebelumnya cukup dominan. Pendekatan ini mendukung teori manajemen pendidikan yang mengutamakan efisiensi dan fokus pada pencapaian hasil yang efektif. Menurut kerangka pengelolaan kelas yang dikembangkan oleh Robert Marzano (dalam Marzano & Marzano, 2003), pengurangan beban administratif memungkinkan pendidik untuk lebih mengoptimalkan waktu dan energi dalam interaksi langsung dengan siswa,

sehingga mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih dinamis dan interaktif.

Namun, penyederhanaan ini juga membawa tantangan tersendiri. Dengan hanya mencakup tiga komponen inti, ada potensi bahwa perencanaan pengajaran dapat kehilangan kedalaman dan keragaman metode. Ada kekhawatiran bahwa komponen penting lain yang tidak lagi wajib dicantumkan secara eksplisit, seperti pemilihan media pembelajaran dan strategi pengajaran yang spesifik, berisiko terabaikan. Sebagai contoh, seorang tutor mungkin tidak lagi merasa perlu untuk merencanakan penggunaan media digital interaktif atau sumber belajar dari luar kelas karena hal tersebut tidak menjadi bagian dari tiga komponen inti RPP yang wajib ditulis.

Akibatnya, pembelajaran dapat menjadi kurang variatif dan cenderung monoton, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas pengalaman belajar siswa. Dari perspektif teori konstruktivisme, meskipun simplifikasi RPP mempermudah tugas administratif, hal ini mungkin mengurangi ruang bagi pengembangan metode pembelajaran yang lebih kaya dan responsif terhadap perbedaan karakteristik siswa. Tanpa pertimbangan yang matang terhadap berbagai pendekatan dan media, proses pembelajaran berisiko menjadi kurang efektif dalam membangun pemahaman yang mendalam.

Kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Dengan menetapkan zona tertentu, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta memberikan kesempatan yang lebih merata bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi untuk mengakses pendidikan berkualitas. Kebijakan zonasi ini juga sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif yang diusung dalam teori pendidikan sosial, yang mengutamakan pemerataan akses pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau geografis.

Namun, kebijakan zonasi ini tidak luput dari kritik. Salah satu kelemahan utama dari kebijakan ini adalah pembatasan terhadap kebebasan siswa untuk memilih sekolah yang mereka anggap terbaik. Ketika siswa dibatasi hanya pada sekolah-sekolah di zona tertentu, hal ini dapat mengurangi peluang mereka

untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Kebijakan zonasi juga menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan ketidaksesuaian antara jumlah dan komposisi siswa yang diterima melalui jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Beberapa siswa yang memiliki potensi luar biasa mungkin kesulitan untuk masuk ke sekolah favorit yang sesuai dengan minat mereka, sementara di sisi lain, sekolah-sekolah dengan kualitas yang lebih rendah mungkin tetap memiliki jumlah siswa yang lebih banyak karena keterbatasan sistem zonasi ini.

Kebijakan Merdeka Belajar membawa berbagai inovasi yang dapat memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, seperti peningkatan fleksibilitas dalam penilaian melalui USBN dan Model Asesmen Kompetensi Minimum, serta penyederhanaan RPP yang memungkinkan pengajar untuk lebih fokus pada pengajaran. Namun, kebijakan ini juga memiliki sejumlah kelemahan yang harus diperbaiki, terutama terkait dengan ketidakhadiran standar yang jelas dalam USBN dan ketidaksesuaian kebijakan zonasi yang membatasi kebebasan memilih sekolah bagi siswa. Dalam penerapannya, kebijakan Merdeka Belajar harus terus dievaluasi dan diperbaiki dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan serta teori-teori pendidikan yang relevan. Kebijakan ini, meskipun menjanjikan, harus diimbangi dengan pemantauan yang cermat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh siswa di Indonesia.

### 3. Alternatif Kebijakan

Kebijakan Merdeka Belajar, yang mulai digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kini Kemendikbudristek) sejak tahun 2019, telah menjadi tonggak penting dalam upaya transformasi pendidikan di Indonesia, tidak hanya di sektor formal tetapi juga di pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Mengingat konteks tersebut, implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam pendidikan nonformal memerlukan adaptasi yang selaras dengan kondisi lokal serta kebutuhan spesifik peserta didik. Tulisan ini bertujuan menganalisis implementasi empat pilar kebijakan Merdeka

Belajar dalam pendidikan nonformal, yaitu: Proses Belajar Merdeka, Tutor Berkualitas, Pendidikan Berbasis Komunitas, dan Kurikulum Merdeka.

#### a) Kebijakan Proses Belajar Merdeka untuk Pendidikan Nonformal.

Kebijakan pertama yang perlu diperhatikan dalam pendidikan nonformal adalah kebijakan Proses Belajar Merdeka. Dalam sektor ini, proses belajar yang fleksibel sangat penting untuk memberi akses kepada masyarakat yang beragam, termasuk mereka yang bekerja atau memiliki keterbatasan waktu. Kebijakan ini memungkinkan peserta didik memilih materi dan metode belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Pendekatan ini tidak hanya menekankan hasil pendidikan, tetapi juga pada proses pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik, seperti kelas luar ruangan atau pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini memberi kesempatan bagi individu untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan bakat dan kebutuhan masing-masing, tanpa mengabaikan standar kompetensi yang relevan dengan dunia kerja.

#### b) Kebijakan Tutor Berkualitas Merdeka dalam Pendidikan Nonformal

Aspek penting lainnya dalam pendidikan nonformal adalah kualitas tutor atau pendidik. Oleh karena itu, kebijakan Tutor Berkualitas Merdeka sangat relevan. Kebijakan ini menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi tutor agar mereka dapat mengembangkan metode pengajaran yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Banyak tutor dalam pendidikan nonformal berasal dari latar belakang non-akademis atau memiliki keterbatasan dalam kompetensi pedagogis. Oleh karena itu, kebijakan ini harus mencakup peningkatan keterampilan tutor dalam berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik nonformal. Dengan memberi kesempatan bagi tutor untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi, diharapkan kualitas pengajaran dapat meningkat, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien.

Kebijakan Pendidikan Berbasis Komunitas Merdeka Alternatif kebijakan berikutnya adalah kebijakan Pendidikan Berbasis Komunitas Merdeka. Banyak

lembaga pendidikan nonformal di Indonesia yang berbasis pada komunitas atau masyarakat lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola proses pembelajaran di tingkat lokal. Dengan pendekatan berbasis komunitas, peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang lebih akrab dan mendalam. Kebijakan ini juga mendukung pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan di kalangan peserta didik, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendidikan berbasis komunitas memanfaatkan potensi sumber daya lokal, yang menjadikannya lebih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

c) Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar untuk Pendidikan Nonformal

Kurikulum Merdeka Belajar dalam pendidikan nonformal memberikan kebebasan dalam penentuan materi ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Kebijakan ini memungkinkan pendidikan nonformal lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Kurikulum yang fleksibel sangat penting untuk mendorong pembelajaran yang mandiri dan berbasis teknologi. Dengan mengintegrasikan teknologi dan berbagai sumber belajar lainnya, peserta didik dapat mengakses materi yang lebih luas dan relevan. Selain itu, kurikulum ini harus mengakomodasi berbagai pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan praktis dan aplikatif yang sangat dibutuhkan di dunia kerja.

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar secara fundamental mentransformasi lanskap pendidikan nonformal (PNF) di Indonesia, dengan potensi besar untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih inklusif, relevan, dan otonom. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini mendorong setidaknya empat pergeseran utama:

1) Kurikulum Fleksibel: Terjadi pergeseran dari kurikulum berbasis konten yang kaku menuju kurikulum yang fleksibel dan personal, yang mengadopsi metodologi seperti pembelajaran berbasis proyek (project-based

learning) dan berbasis masalah (problem-based learning) untuk membangun kompetensi nyata (Kamaruddin et al., 2023).

2) Penilaian Otentik: Sistem evaluasi bergerak dari asesmen terstandar yang berorientasi pada hasil (seperti UN) menjadi penilaian otentik (misalnya portofolio dan unjuk kerja) yang lebih holistik dan terintegrasi dengan proses belajar.

3) Evolusi Peran Tutor: Peran tutor berevolusi dari seorang pengajar dan sumber utama informasi menjadi seorang fasilitator, mentor, dan kurator pengalaman belajar yang memandu kemandirian peserta didik.

4) Ekosistem Belajar Terdesentralisasi: Kebijakan ini mendorong penguatan ekosistem belajar yang terdesentralisasi dengan memanfaatkan sumber daya komunitas dan kemitraan industri lokal, menjadikan lingkungan sekitar sebagai laboratorium belajar (Rifai et al., 2022).

Prinsip-prinsip otonomi dan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini sangat selaras dengan kerangka teori konstruktivisme (Piaget, 1952; Vygotsky, 1978), yang menekankan pentingnya pembentukan pengetahuan secara aktif oleh individu. Selain itu, semangatnya sejalan dengan pandangan pendidikan humanistik, yang mengutamakan aktualisasi diri dan pengembangan potensi unik setiap peserta didik. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk mengatasi tantangan utama, yakni kesenjangan kompetensi profesional tutor dan ketersediaan sumber daya yang merata.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap sistem pendidikan, termasuk dalam konteks Pendidikan Nonformal (PNF). Secara filosofis, kebijakan ini menawarkan otonomi yang lebih besar bagi peserta didik untuk belajar sesuai minat, bakat, dan kebutuhan individual. Implementasinya di PNF membuka peluang untuk pengembangan kurikulum yang adaptif dan pemanfaatan sumber belajar yang relevan dengan konteks lokal, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan

aplikatif peserta didik. Namun, di balik peluang besar tersebut, pelaksanaannya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan.

Tantangan utama dalam konteks pendidikan nonformal berpusat pada beberapa isu krusial. Menggunakan struktur paralel, tantangan tersebut mencakup: rendahnya kompetensi profesional tutor, kurangnya sinkronisasi antara kurikulum yang ditawarkan dengan tuntutan dunia kerja dan industri, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya pembelajaran yang berkualitas dan relevan. Isu-isu ini menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan kebijakan untuk menghasilkan lulusan PNF yang berdaya saing.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah strategis perlu menjadi fokus utama, mulai dari penguatan Proses Belajar Merdeka, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tutor, hingga pengembangan pendidikan berbasis komunitas. Penerapan strategi ini secara konsisten merupakan kunci untuk memaksimalkan potensi Merdeka Belajar. Dengan pendekatan yang terarah dan evaluasi berbasis data, kebijakan Merdeka Belajar dalam pendidikan nonformal dapat diarahkan menjadi sistem yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika global.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penelitian lanjutan difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi dan pelatihan tutor dalam pendidikan nonformal. Hal ini penting mengingat kualitas pengajaran sangat bergantung pada kemampuan tutor untuk mengadaptasi metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Selain itu, pengembangan kurikulum yang fleksibel dan kontekstual perlu dikaji lebih mendalam agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan tuntutan pasar kerja. Penelitian empiris mengenai dampak pendidikan berbasis komunitas juga sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemberdayaan peserta didik dan masyarakat lokal dapat meningkat melalui pendekatan ini. Selanjutnya, evaluasi terhadap implementasi kebijakan zonasi dalam pendidikan nonformal perlu dilakukan untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat tercapai secara optimal. Terakhir, pengembangan model asesmen yang mampu

mengukur kompetensi peserta didik secara holistik dan relevan dengan kebutuhan mereka menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam penelitian selanjutnya. Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, diharapkan implementasi Merdeka Belajar dalam pendidikan nonformal dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- AF, M. A., Nurfadilah, K., & Hilman, C. (2022). Pendidikan Luar Sekolah dalam Kerangka Pendidikan Sepanjang Hayat. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 90–95. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.216>
- ahmad, Sari, A. J. T., ahmad, H. W., Rosyid, M. N. I., Widiyanto, E., & Rasyad, A. (2022). Literatur Review: Tren Perkembangan Pendidikan Non-Formal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 7(2), 76–82.
- Aisyah, S. (2018). Perencanaan Dalam Pendidikan. *Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), hal. 730.
- Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 8(3), 381–391. <https://doi.org/10.1080/13540600210000512>
- Kamaruddin, I., Suarni, E., Rambe, S., Sakti, B. P., Rachman, R. S., & Kurniadi, P. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Dalam Pendidikan: Tinjauan Literatur. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 2742–2747. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/22138>
- Kuntoro, S. A. (2006). Pendidikan Nonformal (PNF) Bagi Pengembangan Sosial. *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*, 1 (2), 14–18. 1(20), 14–18.
- Kushnir, I., & Nunes, A. (2022). Education and the UN Development Goals Projects (MDGs and SDGs): Definitions, Links, Operationalisations. *Journal of Research in International Education*, 21(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/14752409221088942>

- Lailatul, I., Rahma, M. A., & Bashith, A. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Non-Formal dalam rangka mensukseskan merdeka belajar yang terkandung dalam kebijakan antara lain: kompetensi dan portofolio, ujian nasional diubah menjadi assessment kompetensi minimum. 4(2), 918-931.
- Lamuri, A. B., & Laki, R. (2022). Transformasi Pendidikan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter Di Era Disrupsi. *Guru Tua : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 21-30. <https://doi.org/10.31970/gurutua.v5i2.122>
- Marzano, R. J., & Marzano, J. S. (2003). The Key to Classroom Management. *Educational Leadership*, 61(1), 6-13.
- Muhammad Rafik, Vini Putri Febrianti, Afifah Nurhasanah, & Siti Nurdianti Muhajir. (2022). Telaah Literatur: Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) terhadap Kreativitas Siswa Guna Mendukung Pembelajaran Abad 21. *Jurnal Pembelajaran Inovatif*, 5(1), 80-85. <https://doi.org/10.21009/jpi.051.10>
- Putri, S. A., Asbari, M., & Hapizi, M. Z. (2024). Perkembangan Pendidikan Indonesia: evaluasi potensi implementasi merdeka belajar. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(2), 39-46.
- Putri, Y. S., & Arsanti, M. (2022). Kurikulum Merdeka Sebagai Upaya Pemulihan Pembelajaran. *Prosiding Seminar Nasional Sultan Agung*, 4(November), 21-26. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/sndiksa/article/view/27269>
- Ramadan, F., & Tabroni, I. (2020). Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka-Merdeka Belajar. *Jurnal Pengabdian: Lebah*, 13(2), 2-5.
- Rifai, R., Firmansyah, F., Hendra, H., Rizkiani, F., & Muhammadon, M. (2022). Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dunia Pendidikan Luar Sekolah. *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(2), 70-76. <https://doi.org/10.58258/jupe.v7i2.3437>
- Siahaan, J. A., Sinaga, E., Malau, S., & Stevani, K. (2025). Lembaga Pendidikan Nonformal Di Pkbn Kreatif Medan Analysis Of Human Resource Management In Non-Formal Educational Institutions At Pkbn Kreatif Medan. *April*, 6414-6421.
- Supardan, H. D. (2016). Teori dan Pratik pendekatan dalam pembelajaran. *Jurnal Edunomic*, 4 No.1(1), 1-15. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62239329/199-388-1-SM\\_120200301-68210-1pyss04-libre.pdf?1583059526=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSM\\_1.pdf&Expires=1703979534&Signature=G6hSRVNHouHn6MyWj8gWyXu8TCTaoZ0zFGafoSu4qAlgLbRy8kQyapC1vk5Av](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62239329/199-388-1-SM_120200301-68210-1pyss04-libre.pdf?1583059526=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSM_1.pdf&Expires=1703979534&Signature=G6hSRVNHouHn6MyWj8gWyXu8TCTaoZ0zFGafoSu4qAlgLbRy8kQyapC1vk5Av)
- Susanti, S. (2016). Meningkatkan Efektivitas Pendidikan Non Formal. 0, 1-23.
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 125-131. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>
- Syufa'ati, & Nadhifah, N. (2020). Perkembangan Pendidikan Non Formal di Era Merdeka Belajar. *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 1(3), 161-165.
- Taufiq, A., Susanto, R. T., Prayugo, R. B., & Ramadhani, G. F. (2024). Kebijakan Pemerintah pada Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional (UN). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(9), 9498-9504. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5355>
- Ulum, B., & Syafi'i, I. (2022). Implementing Contextual Teaching and Learning Models in Islamic Religious Education Learning. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 45-53. <https://doi.org/10.59373/academicus.v1i1.6>
- Yasmansyah, Y., & Sesmiarni, Z. (2022). Konsep Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(1), 29-34. <https://doi.org/10.31004/jpion.v1i1.12>